I Kadek Bagiana, S.E., M.Si.

# AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

# AKUNTANSI
## SEKTOR PUBLIK

I Kadek Bagiana, S.E., M.Si.

Penerbit widina

**AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

Penulis:
**I Kadek Bagiana, S.E., M.Si.**

Desain Cover:
**Fawwaz Abyan**

Sumber Ilustrasi:
**www.freepik.com**

Tata Letak:
**Handarini Rohana**

Editor:
**Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Susandya, S.E., M.Si., Ak., CA.**

ISBN:
**978-623-459-823-0**

Cetakan Pertama:
**November, 2023**

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
**by Penerbit Widina Media Utama**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**
**WIDINA MEDIA UTAMA**
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

# KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Akuntansi Sektor Publik telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan Akuntansi Sektor Publik**.**

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis terhadap Akuntansi Sektor Publik**.** Buku ini merupakan panduan komprehensif untuk memahami akuntansi dalam konteks sektor publik bagi para profesional keuangan, akademisi, praktisi sektor publik dan semua yang tertarik dalam tata kelola publik yang baik.

Bab-bab yang disajikan dalam buku ini terkait akuntansi sektor publik yang lebih mendalam, seperti gambaran umum akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan sektor publik, organisasi nirlaba, laporan keuangan sektor publik, akuntansi manajemen sektor publik, sistem pengendalian manajemen sektor publik, penganggaran sektor publik, jenis-jenis anggaran sektor publik, APBN dan APBD, strategi pembelanjaan dan investasi sektor publik, penilaian kinerja sektor publik, rasio keuangan organisasi sektor publik, audit sektor publik, proses audit kinerja.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2023

Penulis

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **iii**
**DAFTAR ISI** ..... **v**
**BAB 1 GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK** ..... **1**
A. Karakteristik Organisasi Sektor Publik ..... 1
B. Tujuan dan Perkembangan Akuntansi Sektor Publik ..... 3
C. Perbandingan Akuntansi Sektor Publik dan Swasta ..... 4
D. Bidang-Bidang Terapan Akuntansi Sektor Publik ..... 5
E. Rangkuman ..... 7
F. Soal Latihan ..... 8
**BAB 2 AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK** ..... **9**
A. *International Public Sector Accounting Standard* (IPSAS) ..... 9
B. Standar Akuntansi Pemerintah ..... 11
C. Teknik-Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik ..... 12
D. Rangkuman ..... 13
E. Soal Latihan ..... 14
**BAB 3 ORGANISASI NIRLABA** ..... **15**
A. Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba ..... 15
B. Definisi Sumbangan Terikat dan Tak Terikat ..... 19
C. Teknik-Teknik Organisasi Nirlaba ..... 20
D. Rangkuman ..... 21
E. Soal Latihan ..... 22
**BAB 4 LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK** ..... **23**
A. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik ..... 23
B. Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik Menurut SFAC No. 4 ..... 25
C. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dengan Sektor Swasta ..... 25
D. Rangkuman ..... 27
E. Soal Latihan ..... 27
**BAB 5 AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK** ..... **29**
A. Ruang Lingkup Akuntansi Manajemen Sektor Publik ..... 29
B. Akuntansi Sebagai Alat Perencanaan Organisasi ..... 30
C. Akuntansi Sebagai Alat Pengendalian Organisasi ..... 31
D. Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik ..... 32
E. Rangkuman ..... 36
F. Soal Latihan ..... 36

**BAB 6 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK ..... 37**
A. Sistem Pengendalian Manajemen ..... 37
B. Tipe Pengendalian Manajemen ..... 38
C. Struktur Pengendalian Manajemen ..... 38
D. Proses Pengendalian Manajemen ..... 40
E. Rangkuman ..... 42
F. Soal Latihan ..... 43
**BAB 7 PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK ..... 45**
A. Pengertian Anggaran Sektor Publik ..... 45
B. Fungsi Anggaran Sektor Publik ..... 46
C. Siklus Anggaran Sektor Publik ..... 47
D. Rangkuman ..... 48
E. Soal Latihan ..... 49
**BAB 8 JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK ..... 51**
A. Anggaran Tradisional ..... 51
B. Anggaran Publik dengan Pendekatan NPM ..... 52
C. Anggaran Kinerja ..... 53
D. Rangkuman ..... 55
E. Soal Latihan ..... 56
**BAB 9 APBN DAN APBD ..... 57**
A. Pengertian APBN ..... 57
B. Penyusunan APBN ..... 58
C. Perhitungan APBN ..... 59
D. Pengertian APBD ..... 60
E. Penyusunan APBD ..... 61
F. Perhitungan APBD ..... 61
G. Rangkuman ..... 63
H. Soal Latihan ..... 63
**BAB 10 STRATEGI PEMBELANJAAN DAN INVESTASI SEKTOR PUBLIK ..... 65**
A. Penentuan Kebutuhan Investasi Publik ..... 65
B. Aspek Kelayakan Investasi ..... 66
C. Determinan Investasi Publik ..... 67
D. Teknik Dasar Penilaian Investasi Publik ..... 69
E. Rangkuman ..... 74
F. Soal Latihan ..... 75
**BAB 11 PENILAIAN KINERJA SEKTOR PUBLIK ..... 77**
A. Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik ..... 77
B. Indikator Kinerja dan *Value for Money* ..... 79
C. Pengukuran *Value for Money* ..... 80
D. Langkah-Langkah Pengukuran *Value for Money* ..... 81

E. Pengukuran *Value for Money* Audit ..... 82
F. *Balanced Scorecard* di Sektor Publik ..... 82
G. Rangkuman ..... 83
H. Soal Latihan ..... 84
**BAB 12 RASIO KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK ..... 85**
A. Analisis Rasio Keuangan Sektor Publik ..... 85
B. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ..... 86
C. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah ..... 87
D. Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah ..... 87
E. Rasio Aktivitas ..... 87
F. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ..... 88
G. Rasio Ketergantungan ..... 88
H. *Debt Service Coverage Ratio* ..... 89
I. Rasio Pertumbuhan ..... 90
J. Rasio Standar Penerimaan Pendapatan ..... 90
K. Rangkuman ..... 92
L. Soal Latihan ..... 93
**BAB 13 AUDIT SEKTOR PUBLIK ..... 95**
A. Ruang Lingkup Audit Sektor Publik ..... 95
B. Audit Sektor Publik dan Audit Sektor Swasta ..... 96
C. Jenis-Jenis Audit Sektor Publik ..... 97
D. Teknik-Teknik Audit Sektor Publik ..... 97
E. Contoh Praktik Audit Sektor Publik ..... 98
F. Rangkuman ..... 98
G. Soal Latihan ..... 99
**BAB 14 PROSES AUDIT KINERJA ..... 101**
A. Struktur Audit Kinerja ..... 101
B. Tahap Pengenalan dan Perencanaan ..... 103
C. Tahap Audit ..... 104
D. Tahap Pelaporan ..... 105
E. Tahap Tindak Lanjut ..... 106
F. Rangkuman ..... 107
G. Soal Latihan ..... 108
**DAFTAR PUSTAKA ..... 109**
**BIOGRAFI PENULIS ..... 111**

BAB

1

# GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Mendeskripsikan karakteristik organisasi sektor publik.
2. Menjelaskan tujuan dan perkembangan akuntansi sektor publik.
3. Membandingkan akuntansi sektor publik dan swasta.
4. Menjelaskan bidang-bidang terapan dalam akuntansi sektor publik.

## A. KARAKTERISTIK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Akuntansi sektor publik menjadi unsur yang sangat penting dalam menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan termasuk pengelolaan keuangan dan pelaporan. Aktivitas ini bukan hanya sekadar pencatatan angka-angka, melainkan juga memiliki tujuan yang khusus, yaitu mencapai hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik yang unik, yang mendorong penggunaan metode dan pendekatan yang berbeda dengan akuntansi sektor swasta. Karakteristik-karakteristik ini tidak hanya mencerminkan kompleksitasnya lingkungan di mana sektor publik beroperasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial yang lebih luas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Karakteristik akuntansi sektor publik mencakup aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan yang menjadi fokus utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi sektor publik tidak hanya bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan internal, tetapi juga kepada masyarakat umum, yang memungkinkan penggunaan sumber daya publik dengan sebaik-baiknya.

BAB

2

# AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan International Public Sector Accounting Standard (IPSAS).
2. Menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintah.
3. Menguraikan teknik-teknik akuntansi keuangan sektor publik.

## A. *INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR ACCOUNTING STANDARD* (IPSAS)

*International Public Sector Accounting Standards* (IPSAS) adalah seperangkat standar akuntansi yang digunakan untuk entitas sektor publik di seluruh dunia. IPSAS dirancang untuk memfasilitasi pelaporan keuangan yang konsisten, transparan, dan dapat dibandingkan antara berbagai entitas pemerintahan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan pemerintah, dan lembaga sektor publik lainnya.

IPSAS pertama kali dikembangkan oleh *Committee on Governmental Accounting* (COGA) yang dibentuk oleh *International Federation of Accountants* (IFAC). COGA bertujuan untuk mengembangkan standar akuntansi yang cocok untuk entitas sektor publik di seluruh dunia.

IPSAS berlaku untuk berbagai jenis entitas sektor publik, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan pemerintah, dan lembaga-lembaga sektor publik lainnya yang menghasilkan laporan keuangan. Selain itu, IPSAS juga berlaku untuk organisasi yang menerima dana publik dan menggunakannya untuk tujuan umum. IPSAS mencakup berbagai aspek akuntansi sektor publik, termasuk pengakuan pendapatan, pengukuran aset dan kewajiban, pelaporan aset tak berwujud, pengungkapan informasi, serta pelaporan kinerja keuangan dan non-keuangan.

BAB

3

# ORGANISASI NIRLABA

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan pelaporan keuangan organisasi nirlaba.
2. Menjelaskan definisi sumbangan terikat dan tak terikat.
3. Menguraikan teknik-teknik organisasi nirlaba.

## A. PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA

Organisasi nirlaba berbeda secara signifikan dengan organisasi yang mengutamakan keuntungan finansial. Organisasi nirlaba tidak hanya bertujuan mencari laba, meskipun prinsip "not-for-profit" juga berarti mereka tidak boleh mengalami kerugian. Sebaliknya, surplus yang dihasilkan oleh organisasi nirlaba harus digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk memperkaya pemiliknya.

Selain itu, kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat diperdagangkan, dialihkan, atau dibeli kembali seperti dalam organisasi bisnis. Selain kepemilikan, cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya untuk menjalankan operasinya juga berbeda. Organisasi nirlaba biasanya mengandalkan sumbangan dari anggota dan donatur, yang pada prinsipnya tidak mengharapkan pengembalian atas donasi mereka. Para donatur, baik dengan syarat atau tanpa syarat, mengharapkan transparansi dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana yang mereka sumbangkan. Mereka ingin memastikan bahwa dana yang mereka berikan digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat.

Untuk memenuhi harapan para donatur dan menjaga tingkat akuntabilitas yang tinggi, organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan. Ini bisa menjadi tugas yang menantang, terutama bagi organisasi nirlaba yang memiliki sumber daya terbatas dan lebih berfokus pada

BAB

4

# LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik.
2. Menjelaskan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor public menurut SFAC No. 4.
3. Menjelaskan perbedaan laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta.

## A. TUJUAN DAN FUNGSI LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Laporan keuangan dalam sektor publik memainkan peran integral dalam menyediakan informasi kunci yang mendukung proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Secara menyeluruh, laporan keuangan memiliki tujuan yang penting dan berfungsi sebagai alat yang memberikan informasi vital yang mencakup berbagai aspek penting dalam konteks organisasi sektor publik. Berikut tujuan dan fungsi utama dari laporan keuangan sektor publik yang sangat relevan dalam pengelolaan sumber daya publik dan pertanggungjawaban.

Tujuan laporan keuangan sektor publik yaitu:

1. Dalam domain akuntansi sektor publik, informasi yang disediakan untuk proses pengambilan keputusan terbatas pada informasi yang memiliki aspek finansial. Artinya, data keuangan hanya mencakup informasi yang dapat diukur dalam satuan mata uang. Secara lebih detail, tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan organisasi pemerintah meliputi:
2. Mengidentifikasi dan meramalkan arus kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek entitas pemerintah.
3. Menganalisis dan meramalkan kondisi ekonomi unit pemerintah serta perubahan yang terjadi di dalamnya.

BAB

5

# AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik.
2. Menjelaskan akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi.
3. Menjelaskan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi.
4. Menjelaskan peran akuntansi manajemen sektor publik.

## A. RUANG LINGKUP AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Akuntansi manajemen sektor publik adalah cabang dari akuntansi sektor publik yang fokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, dan pelaporan informasi keuangan dan non-keuangan yang diperlukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial di entitas sektor publik. Ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik mencakup berbagai aspek yang berperan dalam pengelolaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan organisasi. Berikut adalah ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik yaitu:

1. Perencanaan dan Anggaran: Akuntansi manajemen sektor publik mencakup perencanaan dan pengembangan anggaran, yang melibatkan proses peramalan dan alokasi sumber daya keuangan untuk berbagai program dan proyek pemerintah. Ini mencakup penentuan prioritas, penetapan target, dan alokasi dana yang tepat.
2. Pengendalian Biaya: Akuntansi manajemen sektor publik membantu dalam mengendalikan biaya dengan memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik. Hal ini termasuk identifikasi penyimpangan dari anggaran, analisis varian anggaran, dan tindakan perbaikan yang diperlukan.

BAB

6

# SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan sistem pengendalian manajemen.
2. Menguraikan tipe pengendalian manajemen.
3. Menguraikan struktur pengendalian manajemen.
4. Menjelaskan proses pengendalian manajemen.

## A. SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN

Setiap organisasi, termasuk yang beroperasi di sektor publik atau swasta, memiliki tujuan yang harus dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi perlu diartikulasikan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, diperlukan sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa strategi organisasi dijalankan secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen melibatkan beberapa kegiatan, termasuk perencanaan, koordinasi di antara berbagai bagian dalam organisasi, komunikasi informasi, pengambilan keputusan, motivasi individu dalam organisasi agar selaras dengan tujuan organisasi, pengendalian, dan penilaian kinerja.

Kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bisa terjadi karena ada kelemahan atau kegagalan pada salah satu atau beberapa tahap dalam proses pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus pada pelaksanaan strategi organisasi dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem pengendalian manajemen tersebut juga memerlukan dukungan unsur-unsur lain seperti struktur organisasi yang sesuai dengan jenis pengendalian

BAB

7

# PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan pengertian anggaran sektor publik.
2. Menjelaskan fungsi anggaran sektor publik.
3. Menguraikan siklus anggaran sektor publik.

## A. PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Anggaran adalah representasi perkiraan yang ingin dicapai selama periode tertentu dalam bentuk nilai finansial, sementara penganggaran adalah proses atau metode untuk menyusun anggaran. Dalam konteks organisasi sektor publik, penganggaran adalah tahapan yang rumit dan memiliki tingkat politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan sebuah proses politik, berbeda dengan sektor swasta yang memiliki nuansa politik yang lebih rendah. Di sektor swasta, anggaran adalah informasi yang bersifat rahasia perusahaan, sedangkan di sektor publik, anggaran harus dipublikasikan untuk tujuan kritik, diskusi, dan masukan. Anggaran sektor publik bertindak sebagai alat akuntabilitas dalam pengelolaan uang publik dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana politik.

Penganggaran sektor publik melibatkan proses penentuan alokasi dana untuk program dan aktivitas dalam nilai moneter. Proses penganggaran di organisasi sektor publik dimulai pada tahap perumusan strategi dan perencanaan strategis. Tahap penganggaran menjadi sangat krusial karena anggaran yang tidak efisien dan tidak berfokus pada kinerja dapat menghambat perencanaan yang telah ditetapkan. Anggaran adalah rencana manajerial untuk mencapai tujuan organisasi, dan harus mencakup aspek-aspek seperti perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas publik.

BAB

8

# JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan anggaran tradisional.
2. Menjelaskan anggaran publik dengan pendekatan NPM.
3. Menjelaskan anggaran kinerja.

## A. ANGGARAN TRADISIONAL

Anggaran Tradisional adalah pendekatan yang sering digunakan di negara berkembang saat ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini: (a) penyusunan anggaran berdasarkan incrementalism dan (b) struktur anggaran yang bersifat line-item. Selain itu, terdapat ciri lain seperti (c) sifat sentralistis, (d) bersifat spesifik, (e) bersifat tahunan, dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Pendekatan Anggaran Tradisional kurang mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan dan sering gagal memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan.

Incrementalism menggambarkan pendekatan incremental dalam Anggaran Tradisional, di mana anggaran hanya ditambah atau dikurangi pada item-item yang telah ada sebelumnya dengan mengacu pada data tahun sebelumnya, tanpa adanya analisis mendalam. Masalah utama dalam Anggaran Tradisional adalah kurangnya perhatian terhadap konsep nilai uang. Konsep ekonomi, efisiensi, dan efektivitas seringkali diabaikan dalam penyusunan anggaran tradisional. Karena kurangnya perhatian terhadap konsep nilai uang, seringkali terjadi kelebihan anggaran pada akhir tahun yang kemudian dialokasikan pada aktivitas yang sebenarnya kurang penting. Anggaran tradisional cenderung menggunakan konsep biaya historis dari layanan, sehingga suatu item, program, atau kegiatan mungkin tetap ada dalam anggaran tahun berikutnya meskipun tidak lagi diperlukan.

BAB

9

# APBN DAN APBD

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan pengertian APBN.
2. Menjelaskan penyusunan APBN.
3. Menghitung APBN.
4. Menjelaskan pengertian APBD.
5. Menjelaskan penyusunan APBD.
6. Menghitung APBD.

## A. PENGERTIAN APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kunci utama dalam pengelolaan keuangan suatu negara, mewakili rencana keuangan yang menentukan bagaimana pemerintah akan membiayai berbagai program dan layanan publik serta mengelola sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah dokumen yang berisi rincian penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk periode satu tahun, yang berlangsung dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember, yang juga dikenal sebagai tahun fiskal. APBN terdiri dari tiga komponen utama, yaitu anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan negara mencakup penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah, yang merupakan hak pemerintah pusat dan menambah nilai kekayaan bersih. Sementara itu, belanja negara mencakup berbagai kewajiban pemerintah pusat untuk mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan memfasilitasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

BAB

10

# STRATEGI PEMBELANJAAN DAN INVESTASI SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan penentuan kebutuhan investasi publik.
2. Menjelaskan aspek kelayakan investasi.
3. Menjelaskan determinan investasi publik.
4. Menguraikan teknik dasar penilaian investasi publik.

## A. PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK

Penentuan kebutuhan investasi publik melibatkan penentuan alokasi anggaran untuk setiap unit organisasi. Sebelum melaksanakan investasi publik, diperlukan analisis mendalam karena investasi ini berhubungan erat dengan isu transparansi dan kepatutan anggaran. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua aspek, yakni peningkatan dalam jumlah dan peningkatan dalam mutu investasi. Ada beberapa cara untuk mengelompokkan usulan investasi yaitu:

1. Investasi Penggantian.

   Investasi yang digunakan untuk menggantikan peralatan atau aset tetap mengikuti usia ekonomisnya. Jika usia ekonomis suatu aset telah berakhir, maka dibutuhkan pembelian aset baru untuk menggantikannya. Penilaian investasi publik harus mempertimbangkan usia teknis dan usia ekonomis dari aset yang akan dibeli. Usia ekonomis berkaitan dengan estimasi waktu di mana suatu aset masih memberikan manfaat, sedangkan usia teknis berkaitan dengan kemampuan aset untuk memberikan manfaat hingga tidak lagi berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, usia teknis suatu aset dapat lebih lama daripada usia ekonomisnya. Ketika aset sudah

BAB

11

# PENILAIAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan pengukuran kinerja organisasi sektor publik.
2. Menjelaskan indikator kinerja dan *value for money*.
3. Menjelaskan pengukuran *value for money*.
4. Menguraikan langkah-langkah pengukuran *value for money*.
5. Menjelaskan pengukuran *value for money* audit.
6. Menguraikan *balanced scorecard* di sektor publik.

## A. PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu kerangka kerja yang bertujuan untuk membantu manajer sektor publik dalam mengevaluasi pencapaian strategi dengan menggunakan indikator finansial dan non-finansial. Sistem ini berperan sebagai alat pengendalian organisasi, mengimplementasikan sistem penghargaan dan hukuman. Pengukuran kinerja di sektor publik diarahkan untuk tiga tujuan utama. Pertama, membantu meningkatkan kinerja pemerintah dengan menetapkan sasaran dan mengukur pencapaian unit kerja, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik. Kedua, digunakan untuk alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ketiga, mendukung pertanggungjawaban publik dan meningkatkan komunikasi organisasi. Manfaat dari pengukuran kinerja meliputi pemahaman tentang ukuran kinerja, bimbingan untuk mencapai target kinerja, pemantauan dan evaluasi kinerja, penggunaan yang objektif untuk penghargaan dan hukuman, komunikasi internal, identifikasi kepuasan pelanggan, pemahaman proses organisasi, dan peningkatan pengambilan keputusan yang objektif.

BAB

12

# RASIO KEUANGAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan analisis rasio keuangan sektor publik.
2. Menjelaskan rasio kemandirian keuangan daerah.
3. Menjelaskan rasio efektivitas pendapatan asli daerah.
4. Menjelaskan rasio efisiensi pendapatan asli daerah.
5. Menjelaskan rasio aktivitas.
6. Menjelaskan rasio derajat desentralisasi fiskal.
7. Menjelaskan rasio ketergantungan.
8. Menjelaskan debt service coverage ratio.
9. Menjelaskan rasio pertumbuhan.
10. Menjelaskan rasio standar penerimaan pendapatan.

## A. ANALISIS RASIO KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Analisis rasio keuangan sektor publik adalah suatu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan entitas pemerintah, seperti pemerintah daerah, lembaga pemerintah pusat, atau badan publik lainnya. Tujuan dari analisis rasio keuangan ini adalah untuk mengukur kesehatan keuangan, efisiensi, dan keberlanjutan keuangan organisasi pemerintah, serta memberikan wawasan tentang cara sumber daya keuangan digunakan dalam penyediaan layanan publik.

Analisis rasio keuangan sektor publik memberikan gambaran tentang kinerja keuangan organisasi pemerintah. Hal ini membantu dalam pengambilan keputusan, perencanaan keuangan, dan perbaikan kebijakan. Selain itu, analisis rasio keuangan juga penting dalam mendukung

BAB

13

# AUDIT SEKTOR PUBLIK

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan ruang lingkup audit sektor publik.
2. Menjelaskan audit sektor publik dan audit sektor swasta.
3. Menguraikan jenis-jenis audit sektor publik.
4. Menguraikan teknik-teknik audit sektor publik.
5. Menguraikan contoh praktik audit sektor publik.

## A. RUANG LINGKUP AUDIT SEKTOR PUBLIK

Secara umum, Audit Sektor Publik adalah suatu proses sistematik yang secara objektif terkait evaluasi bukti-bukti berkaitan dengan pernyataan (asersi) mengenai kegiatan dan peristiwa ekonomi dengan memastikan tingkat kesesuaian asersi tersebut dengan kriteria yang berlaku, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Audit Keuangan Sektor Publik bertujuan untuk memberikan opini jujur tentang posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Audit meliputi segmen laporan keuangan, pengendalian internal, pengawasan internal, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, regulasi dalam Audit Sektor Publik mencakup peraturan dan pedoman yang digunakan untuk mengatur aturan serta ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan audit sektor publik. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga keteraturan, transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi sektor publik.

BAB

14

# PROSES AUDIT KINERJA

Setelah mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu untuk:

1. Menjelaskan struktur audit kinerja.
2. Menjelaskan tahap pengenalan dan perencanaan.
3. Menjelaskan tahap audit.
4. Menjelaskan tahap pelaporan.
5. Menjelaskan tahap tindak lanjut.

## A. STRUKTUR AUDIT KINERJA

Secara prinsip, struktur audit, baik itu audit keuangan, audit kepatuhan, audit manajemen, audit program, dan jenis audit lainnya, memiliki persamaan. Perbedaan utamanya terletak pada tugas-tugas yang spesifik dalam setiap tahapan audit yang mencerminkan kebutuhan dari jenis audit tersebut. Secara keseluruhan, struktur audit mencakup:

1. Tahap-tahap audit.
2. Elemen-elemen dalam setiap tahap audit.
3. Tujuan umum dari setiap elemen.
4. Tugas-tugas khusus yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan.

Audit kinerja, pada dasarnya, memperluas audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedur yang diterapkan. Dengan kerangka struktur audit yang sama, kita dapat mengembangkan struktur audit kinerja yang mencakup:

1. Tahap pengenalan dan perencanaan.
2. Tahap audit.
3. Tahap pelaporan.
4. Tahap tindak lanjut.

# DAFTAR PUSTAKA


Anggono, A. (2022). *Akuntansi Manajemen Pada Entitas Publik*. Penerbit Adab.

Biduri, S. (2018). Akuntansi sektor publik. *Umsida Press*.

Bouckaert, G., Peters, B. G., & Verhoest, K. (2016). *Coordination of public sector organizations*. London: Palgrave Macmillan.

Bovaird, T., & Löffler, E. (Eds.). (2015). *Public management and governance*. Routledge.

Brusca, I., Caperchione, E., Cohen, S., & Rossi, F. M. (Eds.). (2015). *Public sector accounting and auditing in Europe: The challenge of harmonization*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Christensen, T., Lægreid, P., & Røvik, K. A. (2020). *Organization theory and the public sector: Instrument, culture and myth*. Routledge.

Halim, A. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah (ed. 3)*. Penerbit Salemba.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2007). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. *Jakarta: Salemba Empat*.

Halim, A., Setiyono Miharjo, E. M., Halim, A., Fahlevi, H., Abdullah, S., Junita, A., & Rifqy, M. H. (2020). *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Unitomo Press.

Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban*. Poliban Press.

Hartoto, H., Tatmimah, I., Endraria, E., Muzayyanah, M., Sriyani, S., Djasuli, M., & Ardhiarisca, O. (2023). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. Penerbit Widina.

Hopwood, A. G. (2019). *Accounting and organization change*. In *Management Control Theory* (pp. 357-368). Routledge.

Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Deepublish.

Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. Universitas Brawijaya Press.

Knechel, W. R., & Salterio, S. (2016). *Auditing: Assurance and risk*. Routledge.

Kumar, R., & Sharma, V. (2015). *Auditing: Principles and practice*. PHI Learning Pvt. Ltd.

Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.

Laegreid, P. (2017). *Transcending new public management: the transformation of public sector reforms*. Routledge.

Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

Nasution, D. A. D., Ramadhan, P. R., & Barus, M. D. B. (2019). *Audit Sektor Publik: Mahir dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara*. Uwais Inspirasi Indonesia.

Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2022). *Public administration: Understanding management, politics, and law in the public sector*. Routledge.

Sutawijaya, I. N., SE, M. A., & Ardeno Kurniawan, S. E. (2020). *Audit Kinerja: Mendorong Peningkatan Value Organisasi Pemerintah dalam Mewujudkan World Class Government*. Penerbit Andi.

Van Dooren, W., Bouckaert, G., & Halligan, J. (2015). *Performance management in the public sector*. Routledge.

Yosep, M., Ip, S., Ak, M., & Dewi Indriasih, M. M. (2020). *Kualitas Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Manajemen Pada Entitas Sektor Publik*. Scopindo Media Pustaka.

Zamzami, F., & Faiz, I. A. (2018). *Audit Internal: Konsep Dan Praktik*. UGM PRESS.

Zamzami, F., & Pramesti, A. E. (2018). *Audit keuangan sektor publik untuk laporan keuangan pemerintah daerah*. UGM PRESS.

# BIOGRAFI PENULIS

**I Kadek Bagiana, S.E., M.Si.**

Penulis dilahirkan di Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 16 Maret 1995. Riwayat pendidikan penulis yaitu lulus S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar pada tahun 2016, kemudian lulus S2 Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana pada tahun 2019. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar. Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu mata kuliah yang diampu. Selain mengajar, penulis juga aktif membuat penelitian serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang juga merupakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Penulis aktif dalam mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya di jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Penulis juga menjadi anggota Asosiasi Dosen Indonesia (ADI). Adapun karya buku yang telah dihasilkan sejak tahun 2021 baik sebagai penulis maupun editor, di antaranya berjudul Akuntansi Sektor Publik, *Corporate Governance*, Analisis Laporan Keuangan, Pengantar Akuntansi, Manajemen Keuangan Internasional dan Manajemen Risiko. Penulis memilki motto “Profesionalitas dan Integritas”.

# AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Buku ini merupakan panduan komprehensif untuk memahami akuntansi dalam konteks sektor publik bagi para profesional keuangan, akademisi, praktisi sektor publik dan semua yang tertarik dalam tata kelola publik yang baik.

Bab-bab yang disajikan dalam buku ini terkait akuntansi sektor publik yang lebih mendalam, seperti gambaran umum akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan sektor publik, organisasi nirlaba, laporan keuangan sektor publik, akuntansi manajemen sektor publik, sistem pengendalian manajemen sektor publik, penganggaran sektor publik, jenis-jenis anggaran sektor publik, APBN dan APBD strategi pembelanjaan dan investasi sektor publik, penilaian kinerja sektor publik, rasio keuangan organisasi sektor publik, audit sektor publik, dan proses audit kinerja.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-823-0
9 786234 598230